

REFERENCES

- Abdallah, Z., & Maryanto. (2018). Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Kerinci. *JURNAL AKUNTANSI & EKONOMI FE. UN PGRI Kediri*, 66-80.
- Akuntansi, K. S. (2019). Standar Akuntansi Pemerintahan Republik Indonesia.
- Alimuddin. (2018). *Analisis Penyerapan Anggaran Di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Dan Kopertis Makassar*. 2018: FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS HASANUDDIN.
- Basri, Y. M., & Gusnardi. (2021). Pengelolaan Keuangan Pemerintah di Masa Pandemi Covid-19 (Kasus Pada Pemerintah Provinsi Riau). *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia Vol.4 No.1*, 33-48.
- Djalante, R., Lassa, J., Setiamarga, D., Sudjatma, A., Indrawan, M., Haryanto, B., . . . Warsillah, H. (2020). Review and analysis of current responses to COVID-19 in Indonesia: Period of January to March 2020. *Progress in Disaster Science* 6, 100091.
- Efrida, Fitri, F., Rahman, S., Asyari, A., Hafiz, A., Irfandy, D., . . . Rosalinda, R. (2020). Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Melalui Pembuatan dan Pendistribusian Alat Pelindung Diri Pada Berbagai Puskesmas di Kota Padang. *Bulletin Ilmiah Nagari Membangun, Vol. 3, No. 3*, 261-269.
- Fahlevi, H., & Ananta, M. R. (2015). Analisis efisiensi dan efektifitas anggaran belanja langsung - Studi pada SKPD di Pemerintah Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP) Vol. 1, No. 2*, 37-44.
- Halim, A. (2014). *Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hendra, N. (27 Oktober 2020). *Hati-Hati ke Padang, Kantor dan Bank Jadi Kluster Covid-19. Kasus Positifnya Naik*. Padang: KABAR24.

- Iqbal, M. (26 Maret 2020). *Kasus Corona Pertama Sumbar, Pernah Ikut Tabligh di Malaysia*. Bukittinggi: CNBC Indonesia.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). THEORY OF THE FIRM: MANAGERIAL BEHAVIOR, AGENCY COSTS AND OWNERSHIP STRUCTURE. *Journal of Financial Economics* 3, 305-360.
- Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahsun, M. (2009). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Malahayati, C., Islahuddin, & Basri, H. (2015). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Serapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pada Pemerintah Kota Banda Aceh. *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 11-19.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik - Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi.
- Masnarivan, Y., Haq, A., & Putri, A. P. (2021). Upaya Pencegahan Penularan Covid-19 Pada Masyarakat Selama PSBB Di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Endurance: Kajian ilmiah Problema Kesehatan, Vol. 6*, 201-212.
- Novita, H. (2020). Analisis Tingkat Penyerapan Anggaran Triwulan I Sampai Dengan Triwulan III Tahun Anggaran 2018 Pada Satuan Kerja Di Kewilayahan Polda Jatim. *Jurnal Mitra Manajemen Vol. 4, No. 10*, 1459-1471.
- Noviwijaya, A. (2013). *Pengaruh Keberagaman Gender dan Usia Pejabat Perbendaharaan Terhadap Penyerapan Anggaran Satuan Kerja (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Lingkup Pembayaran KPPN Semarang)*. FEB UNDIP SEMARANG: Skripsi (Tidak diterbitkan).

- Onibala, A., Rotinsulu, T. O., & Rorong, I. P. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah Vol.22 No.2*, 67-89.
- Pakpahan, A. K. (2020). *Covid-19 Dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah*. Universitas Katolik Parahyangan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah. (n.d.).
- Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. (n.d.).
- Prasetyo, W. H., & Nugraheni, A. P. (2020). Analisis Realisasi Anggaran Belanja Dalam Rangka Mengukur Efektivitas Dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Magelang Periode 2015 – 2019. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha, Vol : 11 No : 1*, 1-10.
- Putri, C. T. (2014). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi Bengkulu*. Bengkulu: FEB Universitas Bengkulu.
- Rahmadi. (28 Agustus 2020). *Covid-19 Melonjak, Pemprov Sumbar Rencanakan WFH untuk ASN Pekan Depan*. Sumatera Barat: Langgam.Id.
- Ramadhani, R., & Setiawan, M. A. (2019). Pengaruh Regulasi, Politik Anggaran, Perencanaan Anggaran, Sumber Daya Manusia Dan Pengadaan Barang/Jasa Terhadap Penyerapan Anggaran Belanja Pada OPD Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi Vol. 1, No. 2, Seri B*, 710-726.
- Rukayah, Kusumawati, N., & Afriani, R. I. (2017). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Dengan Menggunakan Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi Pada Kantor Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang. *Jurnal Akuntansi Vol 4 No. 2*, 1-11.

Sanjaya, N. (2020). Kebijakan Penganggaran Daerah Dimasa Pandemi Covid-19 (Study Kasus Pada Pemerintah Daerah Provinsi Banten). *Jurnal Ilmu Administrasi Vol.17 No.2*, 273-290.

Sayadi, M. H. (2021). APBN 2020: Analisis Kinerja Pendapatan Negara Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 6(2), 159-171.

Sedarmayanti. (2007). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Refika Aditama.

Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods for Business (7th ed.)*. United Kingdom: John Wiley & Sons.

Sinaga, E. J. (2016). Analisis Rendahnya Penyerapan Kementerian / Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah. *Jurnal Rechts Vinding, Vol. 5, No. 2*, 261-274.

Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

The World Bank. (1992). *Governance and Development*. Washington D.C.: The World Bank.

UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. (n.d.).

UU Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. (n.d.).

UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. (n.d.).

UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. (n.d.).

UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. (n.d.).

UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (n.d.).

Wahyuni, D. S. (6 September 2020). *Sumbar Bakal menerapkan WFH, Berikut Penjelasannya!* Sumatera Barat: KabarSumbar.

Yuhefizar, Asri, E., & Nasrullah. (2020). Rancangan Pemetaan Sebaran Covid-19 di Kota Padang Berbasis Web Geospasial. *Prosiding Seminar Nasional Sistem Informasi dan Teknologi (SISFOTEK) ke 4*, 311-314.

